# IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## A. PENJELASAN UMUM

### A.1. Profil dan KebijakanTeknis Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika didirikan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pengembangan e-Governemnt, Persandian dan Statistik Daerah dan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, pembinaan, dan pengawasan mitra serta Kesekretariatan, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.Serta fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kabupaten Manggarai Barat. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen dengan visi **"Terwujudnya Pelayanan Informasi Publik yang Transparan, Ramah, Cepat dan Tepat".** Untuk mewujudkannyaakan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
- Membina secara efektif Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat/Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kabupaten Manggarai Barat.

## A.3. Basis Akuntansian

Dinas Komunikasi dan Informatika menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi

kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

### (1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Manggarai Barat.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**Aset Lancar**

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

**Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

**Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  a. Kewajiban Jangka Pendek

     Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

  • Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kabupaten Manggarai Barat/Lembaga dan Bendahara Umum Daerah.

  Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

| Kualitas Piutang | Uraian | Penyisihan |
|---|---|---|
| Lancar | Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo | 0.5% |
| Kurang Lancar | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan | 10% |
| Diragukan | Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan | 50% |
| Macet | 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan<br>2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Daerah | 100% |

**(9) Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

***Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap***

| **Kelompok Aset Tetap** | **Masa Manfaat** |
|---|---|
| Peralatan dan Mesin | 2 s.d. 20 tahun |
| Gedung dan Bangunan | 10 s.d. 50 tahun |
| Jalan, Jaringan dan Irigasi | 5 s.d 40 tahun |
| Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) | 4 tahun |

**(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### B.1 PENDAPATAN

**1. Pendapatan** **Rp. 500.000.000,00**

Pendapatan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar **Rp. 500.000.000,00** dan telah direalisasikan sebesar **Rp. 406.048.720,00** atau **81,21%**, yang terdiri dari :

**1.1 Pendapatan Retribusi Daerah** **Rp. 500.000.000,00**

Pendapatan Retribusi Daerah Dinkominfo telah direalisasikan sebesar Rp. **406.048.720,00** atau **81,21%** terhadap anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 yang terdiri dari:

**1.1.1 Retribusi Jasa Umum** dianggarkan sebesar Rp. 500.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 406.048.720,00 atau 81,21% dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian | Anggaran(Rp) | Realisasi(Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 500.000.000,00 | 406.048.720,00 | 81,21% |
| | Jumlah | 500.000.000,00 | 406.048.720,00 | 81,21% |

### 1.1.2 Retribusi Perijinan Tertentu

Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 tidak memiliki Retribusi Perijinan Tertentu selain Retribusi Umum.

### 1.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 tidak memiliki pendapatan daerah lain yang sah selain Retribusi.

## B.2. BELANJA Rp. 4.262.747.381,00

Total Belanja Perangkat Daerah telah direalisasikan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 3.905.325.676,00** atau **91,62%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 4.262.747.381,00** Rincian anggaran dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **BELANJA** | **4.262.747.381,00** | **3.905.325.676,00** | **91,62** |
| **1.** | **BELANJA OPERASI** | **4.159.613.381,00** | **3.830.425.676,00** | **92,09** |
| | a. Belanja Pegawai | 1.804.650.681,00 | 1.796.181.257,00 | 99,53 |
| | b. Belanja Barang dan Jasa | 2.354.962.700,00 | 2.034.244.419,00 | 86,38 |
| | c. Belanja Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d. Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| **2.** | **BELANJA MODAL** | **103.134.000,00** | **74.900.000,00** | **72,62** |
| | a. Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 103.134.000,00 | 74.900.000,00 | 72,62 |
| | c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | **4.262.747.381,00** | **3.905.325.676,00** | **91,62** |

## B.3 BELANJA PEGAWAI

### B.3.1. Belanja Pegawai Rp. 1.804.650.681,00

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 yang telah direalisasikan sebesar Rp. 1.796.181.257,00 atau 99,53% dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.804.650.681,00 Belanja pegawai tersebut terdiri dari:

| No | Uraian Belanja | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|---|
| **A** | **Belanja Pegawai** | | | |
| 1. | Gaji dan Tunjangan Pegawai | 1.499.834.000 | 1.492.411.526 | 99,51 |
| 2. | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja | 188.296.681 | 188.296.681 | 100,00 |
| 3. | Insentif Retribusi Daerah | 4.500.000 | 4.258.050 | 94,62 |
| 4. | Honorarium PNS | 112.020.000 | 111.215.000 | 99,28 |
| | **Sub Jumlah A** | **1.804.650.681** | **1.796.181.257** | **99,53** |

## B.4 BELANJA BARANG DAN JASA Rp. 2.354.962.700,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2023 sebesar **Rp. 2.034.244.419,00** atau 86,38**%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 2.354.962.700,00** Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5,00 |
| 1 | Belanja Pakai Habis | 92.369.200 | 85.611.100 | 92,68 |
| 2 | Belanja Jasa Kantor | 2.088.499.860 | 1.792.213.519 | 85,81 |
| 3 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) | 10.373.640 | 8.338.350 | 80,38 |
| 4 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 79.700.000 | 68.043.000 | 85,37 |
| 5 | Belanja Perjalanan Dinas | 84.020.000 | 80.038.450 | 95,26 |
| | **TOTAL BELANJA BARANG DAN JASA** | **2.354.962.700** | **2.034.244.419** | **86,38** |

☞ Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp. 80.038.450,00** atau 95,26**%** dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 84.020.000,00**. Belanja Perjalanan Dinas, Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021 dapat dirincikan sebagai berikut:

| NO. | KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 600.000 | 600.000 | 100,00 |
| 2 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1.920.000 | 1.920.000 | 100,00 |
| 3 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah | 23.720.000 | 23.668.250 | 99,78 |
| 4 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 2.480.000 | 2.450.000 | 98,79 |
| 5 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 9.810.000 | 6.210.000 | 63,30 |
| 6 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | 490.000 | 420.000 | 85,71 |
| 7 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5.020.000 | 5.010.000 | 99,80 |
| 8 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | 2.280.000 | 2.280.000 | 100,00 |
| 9 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 8.240.000 | 8.079.950 | 98,06 |
| 10 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | 3.140.000 | 3.120.000 | 99,36 |
| 11 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa untuk Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE | 25.720.000 | 25.680.250 | 99,85 |
| 12 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 600.000 | 600.000 | 100,00 |
| **Total** | | **84.020.000** | **80.038.450** | **95,26** |

## B.5 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Belanja Modal tahun 2023 telah direalisasikan sebesar **Rp. 74.900.000,00** atau 72,62% dari yang dianggarkan sebesar **Rp. 103.134.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 103.134.000 | 749.00.000 | 72,62 |
| | **TOTAL BELANJA MODAL** | **103.134.000** | 749.00.000 | 72,62 |

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | |
| 1 | Belanja Modal Mebel | 2.514.000 | 2.500.000 | 100 |
| 2 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 8.000.000 | 7.000.000 | 100 |
| 3 | Utang Tahun 2022 | 92.620.000 | 65.400.000 | 100 |
| **TOTAL BELANJA MODAL** | | **103.134.000** | **74.900.000** | **96,78** |

## B.6. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Tahun 2023 tidak terdapat anggaran belanja modal gedung dan bangunan sehingga realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2023 adalah nihil.

## B.7. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Tahun 2023 tidak terdapat anggaran belanja jalan, irigasi dan jaringan sehingga realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2023 adalah nihil.

## B.8. SURPLUS/(DEFISIT)

Dari realisasi pendapatan sebesar **Rp 406.048.720,00** dikurangi realisasi belanja daerah sebesar **Rp 3.905.325.676,00,** maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023 mengalami Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar **Rp. -3.499.276.956,00.**

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

## C.1. ASET LANCAR

### C.2.a. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 adalah Rp.0 atau nihil.

**C.1.b. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan 31 Desember 2023 Rp.0 atau nihil.

**C.2.c. Kas di BLUD**

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 adalah Rp.0 atau nihil.

**C.3.d. Kas Lainnya**

Tidak terdapat saldo Kas lainnya untuk tahun 2023.

**C.4.e. Setara Kas**

Tidak terdapat saldo Setara Kas untuk tahun 2023.

**C.4.f. Kas JKN**

Tidak terdapat saldo Kas JKN untuk tahun 2023.

**C.4.g. Investasi Jangka Pendek**

Tidak terdapat saldo investasi jangka pendek untuk tahun 2023.

**C.5.h. Piutang Pendapatan**

Tidak terdapat Piutang Pendapatan tahun 2023.

**C.6.i. Piutang Lainnya**

Tidak terdapat Saldo Piutang Lainnya untuk tahun 2023

**C.6.j. Penyisihan Piutang**

Tidak terdapat Saldo Penyisihan Piutang untuk tahun 2023

**C.6.k. Beban Dibayar Dimuka**

Tidak terdapat Saldo Beban Dibayar Dimuka untuk tahun 2023

**C.7.l. Persediaan**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 62.000,- seperti yang disajikan dalam lampiran laporan ini, saldo persediaan merupakan saldo hasil perhitungan sisa barang yang belum digunakan pada OPD.

## C.2. ASET TETAP

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar **Rp. 2.134.980.627,00**dan **Rp. 2.491.412.830,00** Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

### C.2.a. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp. **591.414.000,00** dan Rp. **591.414.000,00**

| | |
|---|---|
| **Saldo Awal Tahun 2023** | **591.414.000** |
| Belanja Modal (LRA) | - |
| Belanja Non Modal | |
| Hibah (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemda Lain/Masyarakat) | - |
| **Mutasi Kurang** | |
| Aset Tetap yang dihapuskan | - |
| | |
| **Saldo Per 31 Desember 2023** | **591.414.000** |
| Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2023 | - |
| **Nilai Buku per 31 Desember 2023** | **591.414.000** |

### C.2.b. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah **Rp.2.908.054.122,00 dan Rp. 2.991.454.122,00** Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Saldo awal 2023** | **797.148.702** |
| 2 | Belanja Modal 2023 LRA | 80.500.000 |
| 3 | Mutasi Tambah Non Belanja Modal 2022 | |
| 4 | Hibah | |
| 5 | **Jumlah Penambahan** | **80.500.000** |
| 6 | Mutasi Pengurangan 2023 | 65.400.000 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023 | 336.781.558 |
| 8 | **Jumlah pengurangan** | **402.181.558** |
| | | |
| 9 | **Saldo per 31 Desember 2023** *(1+5-8)* | **475.467.144** |

Penjelasan :

- Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin yang berasal dari Belanja Modal (LRA) berupa:

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | | | | |
| 1 | Belanja Modal Pengadaan Printer Epson L3210 | 8.000.000 | 7.000.000 | 87,50 |
| 2 | Belanja Modal Pengadaan Kursi lipat Chitose | 2.514.000 | 2.500.000 | 99,44 |
| 3 | Belanja Modal Pengadaan Orbit | 5.600.000 | 5.600.000 | 100,00 |
| 3 | Pelunas Utang Pembayaran Belanja Konversi Sistem Informasi (BIG Data) | 92.620.000 | 65.400.000 | 70,61 |
| **TOTAL BELANJA MODAL** | | **108.734.000** | **80.500.000** | 74,03 |

## C.2.c. Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah **Rp. 970.492.212,00 dan Rp.995.400.107,00** Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| **Saldo awal tahun 2023** | **995.400.107** |
| **Mutasi tambah:** | |
| Belanja Modal (LRA) | - |
| Belanja Non Modal | - |
| Hibah (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pemda Lain/Masyarakat) | |
| belanja Barang dan Jasa | |
| Kurang Pencatatan (M6 - Hasil Inventarisasi) | |
| **Mutasi kurang:** | **-** |
| Aset Tetap yang dihapuskan | - |
| **Saldo per 31 Desember 2023** | **995.400.107** |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023 | 24.907.895 |
| **Nilai Buku per 31 Desember 2023** | **970.492.212** |

## C.2.d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 97.607.271.00**. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| **Saldo awal Tahun 2023** | **107.450.021** |
| **Mutasi Tambah :** | **-** |
| Belanja Modal 2022(LRA) | 0,00 |
| Belanja non Modal | 0,00 |
| Pindahan dari KDP | 0,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 0,00 |
| **Mutasi Kurang:** | |
| **Saldo per 31 Desember 2023** | **107.450.021** |
| **Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023** | **9.842.750** |
| **Nilai Buku per 31 Desember 2023** | **97.607.271** |

### C.2.e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 adalah Rp. 0.

### C.2.f. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing **Rp. 2.795.937.245,00 dan Rp. 2.522.905.042,00** Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

| No | Aset Tetap | Nilai Perolehan | Akumulasi Penyusutan (Kenaikan/ Penurunan) | Nilai Buku |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanah | 591.414.000 | - | 591.414.000 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 2.908.054.122 | 2.432.586.978 | 475.467.144 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 1.234.594.750 | 264.102.538 | 970.492.212 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 196.855.000 | 99.247.729 | 97.607.271 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | - | - | - |
| 6 | Konstruksi dalam Pengerjaan | - | - | - |
| **Akumulasi Penyusutan** | | **4.930.917.872** | **2.795.937.245** | **2.134.980.627** |

## C.3. ASET LAINNYA

### C.3.a. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 adalah **Rp. 13.035.000,00.** Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| **Saldo awal Tahun 2023** | **13.035.000** |
| **Mutasi tambah:** | |
| Aset Tetap yang dipindahkan ke aset lainnya | |
| **Mutasi kurang:** | |
| Aset Lainnya yg dihapuskan | |
| **Saldo per 31 Desember 2023** | **13.035.000** |
| **Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya** | **0** |
| **Nilai Buku per 31 Desember 2023** | **13.035.000** |

- Penambahan Aset Lainnya tahun 2023 Rp. 0,00 diperoleh dari asset tetap yang dipindahkan ke asset lainnya.
- Pengurangan Aset Lainnya dari Aset Lainnya adalah sebesar Rp. 0,00 (akumulasi penyusutan aset lainnya)
- Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

## C.4. KEWAJIBAN

### C.4.a. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 adalah **Rp. 27.220.000,00** yang terdiri dari Utang Jangka Pendek Lainnya senilai **Rp. 27.220.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

| Uraian | Jumlah |
|---|---|
| Honorarium Tim Sekretariat Satu Data | Rp. 6.220.000 |
| Honorarium Forum Satu Data | Rp. 21.000.000 |
| **Total** | **Rp.27.220.000** |

### C.4.b. Kewajiban Jangka Panjang

Nilai Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah NIHIL.

## C.5. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp. 2.121.167.127,00** dan **Rp. 2.411.852.830,00** Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan

Pendapatan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 406.048.720,00.**

| No. Urut | Uraian | Saldo 2023 |
|---|---|---|
| 1 | **Pendapatan Asli Daerah-LO** | **406.048.720** |
| 2 | Pendapatan retribusi Daerah-LO | 0 |
| 3 | **Lain -lain Pendapatan Yang Sah-LO** | **0** |
| 4 | Pendapatan Hibah-LO | 0 |
| | **JUMLAH PENDPATAN-LO 1+3** | **406.048.720** |

### D.2. Beban

Jumlah Beban pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp. 4.196.011.379,00** dan **Rp 6.067.985.061,00**

Adapun rincian Beban adalah sebagai berikut:

| No. Urut | Uraian | Saldo 2023 | Saldo 2022 |
|---|---|---|---|
| 9 | BEBAN | **4.196.011.379** | **6.067.985.061** |
| 9 . 1 | BEBAN OPERASI | **4.196.011.379** | **6.067.985.061** |
| 9 . 1 . 1 | Beban Pegawai | 1.796.181.257 | 2.008.789.544 |
| 9 . 1 . 2 | Beban Persediaan | 85.301.600 | 160.389.852 |
| 9 . 1 . 2 | Beban Jasa | 1.794.914.869 | 2.609.390.652 |
| 9 . 1 . 2 | Beban Pemeliharaan | 68.043.000 | 423.400.197 |
| 9 . 1 . 2 | Beban Perjalanan Dinas | 80.038.450 | 439.166.914 |
| 9 . 1 . 7 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 371.532.203 | 426.847.902 |

### D.2.a. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp. 1.796.181.257,00** dan **Rp. 2.008.789.544,00** Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan

pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**D.2.b. Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp. 85.301.600,00** dan **Rp. 160.389.852,00.**

**D.2.c. Beban Jasa**

Jumlah Jasa pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp. 1.794.914.869,00** dan **Rp. 2.609.390.652,00.**

**D.2.d. Beban Pemeliharaan**

Jumlah beban pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing **Rp. 68.043.000,00** dan Rp. **423.400.197,00**. Beban pemeliharaan merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja pemeliharaan meliputi pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan mesin.

**D.2.d. Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah beban perjalanan dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing **Rp. 80.038.450,00** dan **Rp. 439.166.914,00**. Beban Perjalanan Dinas adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan baik dalam maupun luar daerah.

**D.2.c. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp. 426.847.902,00** dan **Rp. 426.847.902,00**.

**E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas**

**E.1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp.2.411.852.830,00** dan **Rp. 2.680.830.892,00**

**E.2. Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah **RP. (3.789.962.659,00)**. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

**E.3. Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 0,00.**

**E.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp. 0,00.

**E.5. Koreksi ekuitas lainnya**

Koreksi pencatatan Koreksi ekuitas lainnya untuk tahun 2023 dan 2021 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,00,-** dan **Rp. 48.890.150,00**

**E.6. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar **Rp. 2.121.167.127,00** dan **Rp. 2.411.852.830,00**

**F. Pengungkapan Lain-lain**

Sesuai Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 900.954/PPKD/85/XII/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2023 Tanggal 31 Desember 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat, Pejabat Pengelola Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

Pejabat Pengnelola Keuangan
Dinas komunikasi dan Informatika
Tahun Anggaran 2023

| NO | Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan SKPD | Jabatan Struktural Nama/NIP |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Pengguna Anggaran | Nama : **Paulus Setahu, S. Sos**<br>NIP : 196806292000121004<br>Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2 | Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK Dinkominfo) | Nama : **Dewi Widianti, S. Kom**<br>NIP : 19810517 200904 2 003<br>Jabatan : Kasubag Penyusun Program Keuangan dan Pelaporan |
| 3 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Dinkominfo) | Nama : **Hildegunda Kartini Tulus, ST**<br>NIP : 19790420 200501 2 010<br>Jabatan : Sekretaris |
| 4 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Dinkominfo) | Nama : **Ferdinandus Jemaun, S. Sos**<br>NIP : 19750208 200904 1 002<br>Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi public |
| 5 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Dinkominfo) | Nama : **Tarsisius Cai, S. TP**<br>NIP : 197407252001121003<br>Jabatan : Kepala Bidang Layanan Tata Kelola Aplikasi Informatika |
| 6 | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK Dinkominfo) | Nama : **Alfonsa LH. Ndagu, S. Si**<br>NIP : 197308022000122004<br>Jabatan : Kepala Bidang Data dan Statistik Sektoral |
| 7 | Bendaharawan Pengeluaran | Nama : **Ikang Fawzinilhak, S. IP**<br>NIP : 198702042010011009 |
| 8 | Bendaharawan Penerimaan | Nama : **Veronika Ledis Nuer**<br>NIP : 19830607 200701 2 006 |

Labuan Bajo, tanggal 31 Desember 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Barat

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Paulus Setahu, S. Sos**
Pembina Tk. I
NIP. 196806292000121004